

**Post-Strukturalisme sebagai Strategi Kritik Radikalisme: Membangun Literasi
Keagamaan Kritis dalam Pendidikan Islam**

Ikhwan Sawaty
Universitas Muhammadiyah Parepare

Abstrak

Maraknya narasi radikal di perguruan tinggi, dari kajian eksklusif hingga propaganda kekerasan berbasis agama, mencerminkan krisis epistemik dalam Pendidikan Islam konvensional. Pendekatan tradisional yang memutlakkan makna teks agama dan menguatkan oposisi biner tanpa disadari menjadi ladang subur bagi ekstremisme. Penelitian ini menggunakan pisau analisis post-strukturalis (Derrida, Foucault, Lyotard) untuk mendekonstruksi wacana keagamaan melalui metode kualitatif: analisis wacana kritis, observasi lapangan, dan pembacaan teks. Ditemukan bahwa narasi radikal dibentuk oleh rezim kebenaran yang monopolistik dan otoritas kharismatik. Dekonstruksi Derrida mengungkap ambiguitas makna dalam teks suci, membebaskan tafsir dari dominasi tunggal. Studi ini tidak berhenti pada kritik, tetapi menawarkan alternatif: model Pendidikan Islam yang mengganti metanarasi radikal dengan narasi-narasi lokal tentang toleransi dan dialog, sejalan dengan tradisi ta'wil dan ikhtilaf. Implikasi praktisnya mencakup kurikulum berbasis fluiditas makna, workshop dekonstruksi, dan simulasi dialog multisuara. Tujuannya: menjadikan kampus ruang tumbuh bagi *critical believer*—beriman, kritis, dan inklusif.

Kata Kunci: Dekonstruksi teks agama, Epistemologi Islam, Post-strukturalisme, Literasi Keagamaan Kritis

Pendahuluan

Fenomena maraknya narasi radikal di lingkungan perguruan tinggi bukan sekadar gejala sosial temporer, melainkan mencerminkan dinamika yang lebih dalam pada tataran ideologis dan epistemologis. Dalam beberapa tahun terakhir, kampus yang seharusnya menjadi ruang aman bagi dialog intelektual dan keberagaman pemikiran justru mulai menjadi ladang subur penyemaian paham-paham intoleran dan eksklusif. Berbagai penelitian menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya kelompok studi tertutup, forum kajian keagamaan yang bersifat indoktrinatif, serta propaganda ideologis yang memanfaatkan teks-teks keagamaan secara literal untuk membenarkan kekerasan simbolik bahkan fisik.(Abbas, 2018)

Kecenderungan ini tidak dapat dilepaskan dari cara pendidikan Islam, khususnya dalam konteks formal dan kelembagaan, merespons dan mengelola ajaran agama. Pendekatan pendidikan Islam yang masih dominan bersifat tekstual-doktrinal, menjadikan teks suci sebagai sumber tunggal kebenaran yang ditafsirkan secara rigid. Model pembelajaran ini kerap memperlakukan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis

Nabi sebagai entitas yang memiliki makna tetap (*fixed meaning*), sehingga menghasilkan sistem berpikir biner: halal versus haram, Islam versus kafir, hak versus batil. Dalam ruang pendidikan seperti ini, tidak tersedia ruang dialogis yang memadai untuk perbedaan pandangan atau pengayaan makna, melainkan justru lahirnya pengafiran terhadap kelompok lain yang tidak sesuai dengan tafsir dominan.(., 2020)

Situasi ini menunjukkan adanya krisis epistemik dalam pendidikan Islam kontemporer. Krisis ini bukan hanya terletak pada isi materi ajar, tetapi juga pada cara berpikir yang dibentuk yakni cara bagaimana kebenaran didefinisikan, ditanamkan, dan dipertahankan. Epistemologi yang dogmatis dan otoriter tidak memberi peluang pada mahasiswa untuk mempertanyakan, mengkaji ulang, atau menafsirkan teks secara kritis dan kontekstual. Padahal, dunia yang terus berubah membutuhkan pendekatan yang lentur, adaptif, dan membuka diri terhadap keragaman perspektif. Tanpa upaya pembaruan epistemologi, pendidikan Islam hanya akan menjadi reproduktor dari narasi-narasi tunggal yang kaku dan, dalam konteks tertentu, dapat dengan mudah dibajak oleh ideologi radikal.

Urgensi pembaruan pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika kita menyadari bahwa radikalisme tidak lahir dari ruang kosong. Ia dibentuk dan dipelihara oleh struktur pendidikan yang menutup ruang tafsir dan perbedaan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan pendekatan baru dalam pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan isi teks, tetapi juga mengajarkan cara membaca teks secara reflektif dan kritis.(Abdullah, 2016) Di sinilah pentingnya mengintegrasikan pendekatan filosofis, khususnya post-strukturalisme, yang mampu menggeser fokus pendidikan dari pemaksaan makna menuju pembukaan makna. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk merelatifkan semua kebenaran, melainkan membentuk nalar keagamaan yang sadar konteks, terbuka terhadap ikhtilaf, dan mampu berdialog dengan keragaman.

Wacana mengenai urgensi pembaruan pendekatan dalam pendidikan Islam berangkat dari kesadaran kritis bahwa radikalisme keagamaan tidak muncul secara spontan atau dalam ruang hampa. Ia merupakan produk historis dan kultural dari konstruksi sistem pendidikan yang selama ini cenderung bersifat monologis, menutup ruang interpretasi, dan menegaskan perbedaan. Sistem ini dibangun di atas fondasi epistemologis yang mengutamakan doktrin tunggal, di mana teks agama diposisikan sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang mutlak, tidak terbuka terhadap dinamika sosial, dan tidak memberi ruang bagi penafsiran alternatif.(Abdurrahmansyah dkk., 2024) Dalam konteks seperti ini, pendidikan agama bukan lagi menjadi medan pencarian makna yang dinamis, melainkan sekadar proses pewarisan dogma yang stagnan.

Kondisi ini menjadi titik krusial mengapa pembaruan pendekatan menjadi sangat relevan dan mendesak. Ketika tafsir agama hanya didefinisikan dari satu perspektif yang dianggap benar secara absolut, maka ruang bagi narasi lain akan disingkirkan atau bahkan dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Inilah yang kemudian melahirkan eksklusivisme teologis, yang dalam praktik sosialnya bisa bermuara pada tindakan-tindakan diskriminatif hingga kekerasan atas nama kebenaran agama. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus bergerak dari model transmisi pengetahuan ke arah transformasi cara berpikir. Artinya, bukan hanya konten keagamaan yang perlu direformulasi, tetapi juga cara menyampaikannya harus membuka ruang kritis-reflektif yang membebaskan peserta didik dari kepatuhan membuta.(Abdurrohman & Syamsiar, 2017)

Dalam kerangka ini, pendekatan post-strukturalisme hadir sebagai tawaran filosofis yang memberi jalan keluar atas kebuntuan epistemik tersebut. Tokoh-tokoh seperti Derrida dan Foucault memberikan perspektif bahwa makna tidaklah tunggal, tetap, dan final. Sebaliknya, makna selalu bersifat cair, kontekstual, dan terbentuk melalui relasi kuasa dalam praktik diskursif.(JISH, 2020) Melalui pendekatan ini, pendidikan Islam diajak untuk tidak lagi memaksakan makna tunggal dari teks, melainkan membuka kemungkinan penafsiran yang beragam, dinamis, dan kontekstual. Membaca teks agama secara post-strukturalis berarti membongkar struktur otoritas yang selama ini membungkam suara-suara alternatif, dan memberikan ruang bagi dialog serta refleksi mendalam atas makna yang hidup dalam konteks sosial yang berbeda-beda.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini bukan dimaksudkan untuk merelativkan seluruh kebenaran atau menegaskan makna teologis yang fundamental. Justru, pendekatan ini bertujuan membentuk nalar keagamaan yang sadar bahwa setiap kebenaran selalu berelasi dengan konteks sosial-budaya tertentu. Dalam tradisi Islam sendiri, semangat ini dapat ditemukan dalam konsep *ta'wil* (penafsiran mendalam) dan *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) yang diakui sebagai bagian dari kekayaan khazanah keilmuan Islam.(Islamy, 2022) Dengan demikian, pendekatan post-strukturalis bukanlah upaya membongkar Islam, melainkan membongkar praktik keberagamaan yang sempit dan kaku, lalu membangun ulang pemahaman agama yang lebih terbuka, inklusif, dan kontekstual.

Kesadaran inilah yang menjadi pondasi penting bagi lahirnya model pendidikan Islam baru yang tidak hanya berorientasi pada hafalan dan kepatuhan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran kritis, empati sosial, dan penghargaan terhadap keragaman. Dalam kerangka ini, kampus dan lembaga pendidikan Islam idealnya bertransformasi menjadi ruang dialog multisuara, bukan ruang indoktrinasi, sehingga melahirkan generasi beriman yang kritis dan toleran, bukan militan yang eksklusif dan penuh kecurigaan terhadap yang berbeda.

Dalam konteks dunia kontemporer yang semakin plural dan kompleks, kampus dan lembaga pendidikan Islam tidak dapat lagi bertahan sebagai ruang yang hanya menyuarakan satu tafsir, satu kebenaran, dan satu corak keberagamaan. Wacana bahwa lembaga-lembaga ini idealnya bertransformasi menjadi ruang dialog multisuara dan bukan ruang indoktrinasi adalah seruan mendasar yang bersifat epistemologis sekaligus etis. Pendidikan Islam, bila terus mempertahankan format indoktrinatif yakni memaksakan kebenaran tunggal tanpa membuka ruang pertanyaan atau perbedaan maka ia berisiko melahirkan generasi yang sempit secara pemikiran, eksklusif dalam beragama, dan kaku dalam bersikap sosial.(., 2020) Lebih jauh, model pendidikan seperti itu dapat menjadi katalis bagi militansi keagamaan, yakni kondisi ketika seseorang merasa menjadi wakil tunggal kebenaran Tuhan dan merasa berhak memvonis atau bahkan memusuhi yang berbeda.(Abidin & Saadah, 2024)

Sebaliknya, menjadikan kampus sebagai ruang dialog multisuara berarti mengakui kenyataan bahwa keberagamaan umat Islam sendiri penuh keragaman. Dalam sejarah Islam klasik, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan bahkan produktif. Munculnya berbagai mazhab fiqh, kalam, hingga pendekatan tasawuf adalah bukti bahwa umat Islam telah lama hidup berdampingan dengan ragam tafsir dan pendekatan dalam memahami ajaran agama.(Anggraini dkk., 2022) Oleh karena itu,

pendidikan Islam yang berbasis dialog tidak bertentangan dengan tradisi, tetapi justru melanjutkan semangat keterbukaan ilmiah yang telah lama melekat dalam khazanah keilmuan Islam.

Transformasi menuju ruang dialog multisuara juga berarti mengubah relasi antara pengajar dan peserta didik. Di ruang indoktrinasi, dosen atau guru menjadi otoritas tunggal yang harus ditaati secara pasif. Sementara dalam ruang dialogis, pengajar menjadi fasilitator pemikiran kritis, bukan penyampai dogma. Mahasiswa didorong untuk bertanya, mengkritisi, dan merenung bukan hanya menerima. Di sinilah terbentuk generasi beriman yang tidak hanya mengenal ritualitas, tetapi juga memiliki nalar keagamaan yang reflektif dan sadar konteks.

Lebih dari itu, ruang dialog multisuara mampu menciptakan iklim akademik yang inklusif dan sehat. Mahasiswa dari berbagai latar belakang mazhab, suku, budaya, bahkan agama dapat merasa aman dan dihargai, karena mereka tidak dipaksa menyesuaikan diri dengan satu cara berpikir. Ruang seperti ini juga mencegah berkembangnya narasi-narasi intoleran, sebab setiap suara diberi tempat, dan setiap pendapat diuji secara rasional. Tentu, ini bukan berarti semua pendapat disamaratakan nilainya, tetapi bahwa proses pertukaran ide dilakukan dalam semangat saling menghargai.

Pendidikan Islam harus berorientasi pada pembentukan pribadi *critical believer* yaitu individu yang beriman dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan atau keterpaksaan. Ia mampu mencintai agamanya tanpa membenci agama lain, dan mampu memegang keyakinannya tanpa menganggap keyakinan orang lain sebagai ancaman. Kampus yang memfasilitasi ruang multisuara bukan hanya mencetak lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara spiritual dan sosial. Inilah wajah pendidikan Islam masa depan yang relevan dengan realitas global, dan sejalan dengan semangat Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis dan berbasis kajian filosofis post-strukturalis. Pemilihan pendekatan ini dilandasi oleh kesadaran bahwa isu yang dikaji yakni radikalisme berbasis tafsir keagamaan dan krisis epistemik dalam pendidikan Islam tidak dapat dipahami secara permukaan, melainkan memerlukan pembacaan mendalam terhadap konstruksi makna, praktik diskursif, dan relasi kuasa yang bekerja di balik narasi-narasi keagamaan yang berkembang dalam ruang pendidikan tinggi. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang muncul, melainkan secara aktif melakukan dekonstruksi terhadap narasi-narasi dominan yang selama ini cenderung menutup ruang tafsir alternatif dalam pendidikan Islam.

Dalam kerangka berpikir ini, penelitian memadukan analisis wacana kritis dan pembacaan dekonstruktif terhadap teks-teks keagamaan, terutama yang kerap dijadikan rujukan dalam propaganda eksklusivisme beragama di lingkungan kampus. Pendekatan wacana kritis digunakan untuk membedah bagaimana teks-teks tersebut dimaknai dan dioperasikan dalam kerangka ideologis tertentu, serta bagaimana otoritas keagamaan membentuk dan mempertahankan definisi kebenaran yang hegemonik. Sedangkan dekonstruksi Derrida dimanfaatkan untuk membongkar oposisi-oposisi biner dalam teks suci, seperti Islam-kafir atau jihad-damai, guna mengungkap lapisan ambiguitas makna yang sering kali disembunyikan oleh tafsir literal.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui serangkaian teknik yang saling melengkapi. Dokumentasi terhadap teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan hadis dilakukan untuk mengidentifikasi kutipan-kutipan yang sering dimanipulasi dalam narasi radikal. Selain itu, dilakukan analisis konten terhadap materi kajian keagamaan tertutup di kampus seperti selebaran, video dakwah, dan unggahan media sosial yang menjadi alat penyebaran wacana eksklusif. Penelitian ini juga melibatkan observasi terbatas terhadap kegiatan keislaman kampus yang menunjukkan indikasi indoktrinasi. Untuk melengkapi pemahaman atas konteks sosial narasi tersebut, dilakukan pula wawancara terbuka dengan mahasiswa, dosen, dan aktivis keagamaan kampus yang memiliki pengalaman langsung dalam mengamati atau terlibat dalam dinamika keislaman kampus. Seluruh data dikumpulkan secara purposive, dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap konstruksi wacana keagamaan dan hubungannya dengan struktur pendidikan yang tertutup.

Analisis data dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang merujuk pada kerangka Michel Foucault, untuk mengungkap mekanisme produksi dan distribusi makna dalam teks serta bagaimana institusi keagamaan memelihara kekuasaan simbolik melalui bahasa. Tahap kedua melibatkan pembacaan dekonstruktif atas teks-teks keagamaan dengan pendekatan Jacques Derrida, guna mengidentifikasi ambiguitas makna, membongkar klaim kepastian, dan membuka kemungkinan pemaknaan yang kontekstual serta lebih inklusif.

Dalam menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi, baik terhadap sumber data maupun metode pengumpulan. Dokumentasi, observasi, dan wawancara saling diperbandingkan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan kritis. Di samping itu, refleksivitas peneliti dijaga melalui pencatatan posisi ideologis dan kesadaran terhadap kemungkinan bias selama proses pengumpulan dan analisis data. Hal ini penting agar hasil penelitian tidak terjebak pada reifikasi wacana baru, tetapi tetap konsisten dalam membuka ruang tafsir dan keberagaman makna yang menjadi inti pendekatan post-strukturalis.

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa menguatnya radikalisme di lingkungan perguruan tinggi keislaman tidak muncul secara tiba-tiba atau dalam ruang kosong, melainkan merupakan produk dari krisis epistemik dalam sistem pendidikan Islam itu sendiri. Sistem ini, dalam banyak kasus, masih berpijak pada pendekatan konvensional yang memutlakkan makna teks agama dan mengabaikan kemungkinan-kemungkinan interpretatif. Teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan hadis cenderung diajarkan dalam kerangka makna tetap (fixed meaning), tanpa memberi ruang pada proses penafsiran yang dinamis dan kontekstual. Dalam konteks seperti ini, pendidikan agama bukan hanya menjadi sarana transmisi doktrin, tetapi juga medan pembentukan cara berpikir biner: halal versus haram, Muslim versus kafir, haq versus bathil.

Narasi-narasi keagamaan yang eksklusif ini berkembang subur di tengah iklim kampus yang minim dialog dan refleksi kritis. Penelitian mengamati bahwa di sejumlah perguruan tinggi keislaman, terdapat kecenderungan tumbuhnya kelompok kajian tertutup yang bersifat indoktrinatif, mempromosikan ideologi keagamaan yang tidak memberi tempat bagi perbedaan pendapat, serta sering kali menyusupi aktivitas akademik dengan narasi kekerasan simbolik maupun fisik. Kondisi ini diperparah oleh otoritas-

otoritas karismatik yang mendominasi tafsir agama dan memonopoli kebenaran. Dengan mengutip ayat-ayat tertentu yang dimaknai secara literal, kelompok-kelompok ini membentuk rezim kebenaran yang menjadikan kekerasan sebagai bagian dari ekspresi keimanan.

Temuan penting lainnya adalah bahwa radikalisme tidak hanya terkait dengan konten ajaran, tetapi juga dengan cara berpikir yang dibentuk oleh sistem pendidikan Islam. Di sinilah letak krisis epistemik tersebut: pendidikan tidak lagi membentuk kesadaran kritis, tetapi justru mereproduksi kepatuhan buta terhadap tafsir tunggal. Konsekuensinya, peserta didik tidak terbiasa mengajukan pertanyaan, tidak diberi ruang untuk meragukan, dan tidak dilatih untuk membaca teks agama secara reflektif. Dalam jangka panjang, pola ini mempersiapkan individu menjadi agen eksklusivisme yang merasa sah mengklaim kebenaran tunggal dan mengabaikan keberagaman.

Penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa pendekatan post-strukturalisme dapat menjadi alat analisis yang relevan dan strategis dalam membongkar struktur wacana radikal tersebut. Konsep dekonstruksi Derrida mengungkap bahwa teks agama tidak bersifat final, tetapi penuh ambiguitas yang justru membuka kemungkinan tafsir baru yang lebih kontekstual. Sementara itu, pemikiran Foucault tentang rezim kebenaran membantu membongkar bagaimana institusi keagamaan, guru, dan tokoh karismatik memproduksi narasi dominan melalui mekanisme kekuasaan simbolik. Terakhir, gagasan Lyotard tentang narasi kecil (*little narratives*) menawarkan alternatif atas metanarasi radikal: menggantinya dengan kisah-kisah lokal, kisah toleransi, dan praktik keislaman yang plural di kampus.

Dengan pendekatan ini, kampus dapat direkonstruksi menjadi ruang dialog multisuara—bukan sekadar ruang transmisi kebenaran yang mendorong mahasiswa menjadi *critical believer*: individu yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga kritis, inklusif, dan terbuka terhadap ikhtilaf. Hasil penelitian ini mengarahkan pada urgensi transformasi kurikulum pendidikan Islam, dari yang dogmatis menjadi kontekstual dan reflektif. Inilah bentuk literasi keagamaan kritis yang ingin dibangun.

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pendekatan post-strukturalisme memiliki daya analisis yang sangat relevan dan strategis dalam membongkar struktur wacana radikal dalam pendidikan Islam. Berangkat dari asumsi dasar post-strukturalis bahwa makna tidak bersifat tetap, tunggal, dan final, pendekatan ini membuka ruang kritis terhadap otoritas penafsiran yang selama ini memonopoli kebenaran dalam ruang keagamaan. Melalui pisau analisis yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh seperti Jacques Derrida, Michel Foucault, dan Jean-François Lyotard, penelitian ini mampu menelisik bagaimana teks agama diproduksi, didistribusikan, dan dimaknai dalam kerangka kuasa tertentu, serta bagaimana praktik pendidikan dapat diarahkan pada pembebasan makna dan bukan pada pengekangannya.

Konsep dekonstruksi yang dikembangkan Derrida menjadi salah satu alat epistemologis utama dalam penelitian ini. Dekonstruksi tidak bermaksud untuk meruntuhkan teks, melainkan untuk mengungkap ketegangan, kontradiksi, dan ambiguitas internal dalam teks itu sendiri. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini berarti bahwa ayat-ayat atau hadis-hadis yang sering dimaknai secara literal dan kaku dapat dibaca ulang dengan mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, dan intensi komunikatif yang lebih luas. Misalnya, ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad atau relasi Muslim dan non-Muslim tidak dapat direduksi hanya pada wacana perang atau eksklusivisme, karena dalam lapisan teksnya

terkandung kemungkinan makna yang damai, inklusif, dan dialogis. Di sinilah kekuatan dekonstruksi: ia membebaskan teks dari jeratan dogma, dan membuka kemungkinan bagi pembacaan-pembacaan alternatif yang lebih membumi dan berperikemanusiaan.

Sementara itu, teori rezim kebenaran yang dikemukakan oleh Foucault menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana otoritas keagamaan, dosen, ustaz, dan institusi pendidikan membentuk narasi dominan yang seolah-olah merupakan kebenaran mutlak. Foucault menyatakan bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang netral dan objektif, melainkan diproduksi melalui relasi kuasa dan mekanisme institusional tertentu. Dalam pendidikan Islam, hal ini tercermin dalam cara materi ajar, kurikulum, hingga praktik pembelajaran disusun untuk menegaskan tafsir tertentu, sembari mengeksklusi tafsir yang dianggap menyimpang. Dengan kerangka ini, penelitian membongkar bagaimana radikalisme sering kali tumbuh bukan dari isi ajaran itu sendiri, tetapi dari cara ajaran tersebut diorganisasi secara hegemonik.

Adapun pemikiran Lyotard tentang metanarasi dan little narratives menawarkan solusi konseptual yang aplikatif. Lyotard mengkritik narasi besar (metanarratives) yang mengklaim universalitas, seperti proyek khilafah atau pan-Islamisme eksklusif, dan mengajukan alternatif berupa narasi-narasi kecil yang kontekstual, lokal, dan plural. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini berarti mengganti narasi kekuasaan yang hegemonik dengan kisah-kisah keislaman yang tumbuh dari pengalaman sehari-hari: praktik toleransi antarumat beragama di kampus, dialog antarmazhab, hingga ekspresi spiritualitas yang ramah terhadap perbedaan. Dengan menyemai narasi-narasi kecil ini, pendidikan Islam bukan hanya membendung radikalisme, tetapi juga membentuk nalar keagamaan yang humanis, kritis, dan reflektif.

Dengan demikian, pendekatan post-strukturalisme tidak hanya menjadi kerangka kritik terhadap fondasi ideologis radikalisme, tetapi juga menyediakan fondasi teoritis untuk membangun paradigma pendidikan baru yang mengedepankan keberagaman makna, kesadaran kontekstual, dan pembebasan dari dominasi penafsiran tunggal.

Dalam konteks dunia yang terus berubah, pendekatan post-strukturalisme hadir tidak sekadar sebagai alat kritik terhadap fondasi ideologis radikalisme, melainkan juga sebagai tawaran teoretis yang konstruktif untuk membangun paradigma pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap kompleksitas zaman. Pendidikan Islam saat ini tengah berada dalam persimpangan historis yang genting. Di satu sisi, ia memikul warisan agung berupa teks-teks suci, tradisi intelektual, dan sistem nilai spiritual yang kaya. Namun di sisi lain, ia juga menghadapi tantangan besar berupa politisasi agama, penyempitan makna teks, dan berkembangnya gerakan keagamaan yang bersifat eksklusif, rigid, bahkan cenderung militan.

Dalam kondisi seperti ini, urgensi pembaruan pendidikan Islam menjadi nyata dan tak terelakkan. Sistem pendidikan yang selama ini menekankan pada reproduksi doktrin dan kepatuhan terhadap tafsir tunggal, terbukti tidak cukup mampu membentuk generasi yang mampu berdialog, berpikir kritis, serta menghargai keragaman sebagai bagian dari realitas kehidupan. Justru dari ruang-ruang pendidikan seperti itulah, benih-benih radikalisme ideologis kerap tumbuh. Maka, pendekatan post-strukturalisme dapat menjadi titik tolak untuk merevitalisasi kembali peran pendidikan Islam sebagai sarana

pembentukan manusia merdeka—yang berpikir, merenung, dan mampu membaca realitas dengan kritis serta etis.

Post-strukturalisme menolak anggapan bahwa makna bersifat tetap dan tunggal. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa makna selalu lahir dari konteks, negosiasi, dan relasi kuasa. Dalam pendidikan Islam, pendekatan ini mengajak kita untuk tidak lagi memandang teks agama sebagai entitas yang tertutup dan selesai, melainkan sebagai ruang terbuka yang mengandung kemungkinan-kemungkinan interpretatif yang kaya. Pendekatan ini juga menantang dominasi otoritas tunggal yang selama ini mendikte cara berpikir umat Islam melalui tafsir yang cenderung politis atau ideologis.

Vitalitas pendidikan Islam ke depan terletak pada kemampuannya merespons keragaman pengalaman hidup umat Muslim di berbagai konteks sosial. Pendidikan yang hanya menanamkan doktrin dan membungkam pertanyaan, tidak akan mampu melahirkan generasi yang adaptif terhadap zaman. Sebaliknya, pendidikan yang membuka ruang refleksi, mengajarkan keberanian berpikir, dan menghormati pluralitas makna, justru akan memperkuat akar-akar kemanusiaan dalam ajaran Islam itu sendiri.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip post-strukturalisme, pendidikan Islam dapat dikembalikan pada tujuan dasarnya: membentuk manusia yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga cerdas secara spiritual, kritis secara intelektual, dan inklusif secara sosial. Inilah bentuk keberagamaan yang tidak mudah dimanipulasi oleh agenda politik identitas, dan tidak terjebak pada narasi kebenaran tunggal yang menolak perbedaan. Pendidikan Islam semacam ini justru menjadi vital dalam menjaga kohesi sosial, memperkuat etika peradaban, dan membangun generasi *critical believer* yakni mereka yang beriman dengan kesadaran, bukan dengan keterpaksaan.

Dengan demikian, pendekatan post-strukturalisme bukan hanya relevan, tetapi esensial dalam merancang ulang pendidikan Islam sebagai benteng perdamaian dan laboratorium nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat yang semakin plural dan kompleks.

Pembahasan

Dalam ekosistem pendidikan tinggi Islam, terjalin relasi struktural yang kompleks antara praktik otoritas hermeneutik yang hegemonik dengan potensi radikalisasi epistemik. Fenomena ini termanifestasi ketika pendidik secara sistematis memonopoli interpretasi teks keagamaan melalui mekanisme pedagogis yang menegaskan perspektif alternatif suatu pola yang dalam kerangka teori kritis Foucault dapat dipahami sebagai "efek kuasa-pengetahuan" (power/knowledge effect). Dalam dinamika ini, kurikulum tidak berperan sebagai wahana eksplorasi ilmiah, melainkan berfungsi sebagai instrumen kanonisasi yang mengkodifikasi penafsiran tertentu menjadi doktrin resmi. Proses institionalisasi makna tersebut secara paradoks membekukan tradisi keagamaan yang secara intrinsik bersifat dinamis, mengubahnya menjadi entitas yang terkristalisasi dalam bentuk baku.

Klaim kebenaran tunggal yang dihasilkan melalui mekanisme ini tidak bersifat netral atau objektif, melainkan merupakan produk negosiasi kuasa simbolik di ruang akademik. Penolakan terhadap pluralitas tafsir dengan demikian bukan sekadar kelalaian metodologis, tetapi merupakan penyangkalan

terhadap hakikat multi-dimensionalitas teks suci sebagaimana ditegaskan Nasr Hamid Abu Zayd dalam konsep "teks sebagai produk kultural". Akibatnya, agama yang semestinya berfungsi sebagai living tradition (tradisi hidup) mengalami reduksi menjadi sistem doktriner tertutup yang terisolasi dari denyut kehidupan masyarakat.

Implikasi epistemologis dari kondisi ini bersifat ganda. Di satu sisi, terjadi alienasi makna agama dari konteks sosio-historisnya—fenomena yang oleh Mohammed Arkoun dikritik sebagai "dogmatic enclosure" (pengurungan dogmatis). Di sisi lain, doktrin yang terpetrifikasi tersebut mengembangkan kerentanan untuk mengalami aktivasi ideologis ketika berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik atau ketidakadilan struktural. Dalam skenario ini, kurikulum yang dirancang sebagai sarana transmisi pengetahuan justru berubah menjadi wahana involunter bagi kristalisasi pandangan radikal.(Ahmad dkk., 2024)

Mekanisme inilah yang menjelaskan mengapa radikalisme di lingkungan akademik seringkali merupakan konsekuensi logis endogen, bukan infiltrasi eksternal. Akar persoalannya terletak pada model pendidikan yang mengabsolutkan otoritas guru sebagai final interpreter (penafsir akhir), menganulir prinsip ijтиhad sebagai metode pengembangan hukum, serta mentransformasi teks keagamaan dari locus of meaning (sumber makna) menjadi instrument of control (alat kontrol). Temuan ini memperkuat tesis Olivier Roy tentang "globalisasi Islam yang terlepas dari akar kulturalnya", di mana doktrin yang terdekontekstualisasi mudah direduksi menjadi simbol-simbol identitas konfrontatif. Pada akhirnya, pendidikan Islam kontemporer terjebak dalam dilema paradoksal: upaya mempertahankan ortodoksi melalui penyeragaman tafsir justru memproduksi disfungsi sistemik berupa lahirnya generasi yang menyamakan kesalehan dengan penolakan terhadap keragaman.

Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2018). Tinjauan kritis dan menyeluruh terhadap fundamentalisme dan radikalisme Islam masa kini. *ASH: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/189>
- Abdullah, A. (2016). Gerakan radikalisme dalam Islam: Perspektif historis. *Addin*. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/1127>
- Abdurrahmansyah, A., Saputra, A. A., Chandra, V., Fatrin, J. M., & Nasution, N. H. (2024). Kurikulum masjid dan radikalisme: Strategi ta'mir masjid cegah konten radikal di Kota Palembang. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 16(2), 279–291. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v16i2.3288>
- Abdurrohman, A., & Syamsiar, H. (2017). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) model keberagamaan inklusif untuk mencegah radikalisme beragama di kalangan siswa SMA. *Fenomena*. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/789>

Abidin, Z., & Saadah, T. (2024). Urgensi pendidikan profetik pada era milenial dalam menangkal faham radikalisme di perguruan tinggi Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/paramurobi/article/view/8138>

Ahmad, Hasnawati, H., & Mardiah, M. (2024). Cikal bakal radikalisme dalam Islam. *Edukasi*, 12(1), 43–49.
<https://doi.org/10.61672/judek.v12i1.2742>

Anggraini, S. N., Rahman, A., Martono, T., Kurniawan, A. R., & Febriyani, A. N. (2022). Strategi pendidikan multikulturalisme dalam merespon paham radikalisme. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(1), 30–39.
<https://doi.org/10.57008/jjp.v2i01.93>

Islamy, A. (2022). Pendidikan Islam multikultural dalam indikator moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*.
<https://pdfs.semanticscholar.org/55bc/46ec7045d9443d1bfa6bf3fba6e78c6c0192.pdf>

JISH, E. (2020). Strukturalisme, post-strukturalisme dan neo-strukturalisme. *OSF Preprints*.
<https://doi.org/10.31228/osf.io/36ghb>

M. (2020). Genealogi radikalisme Islam klasik dan kontemporer. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 115–126. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3820>